

Volume 8 Nomor 1 April 2023

e-ISSN 2541-0938
p-ISSN 2657-1528

JURKAMI

Jurnal Pendidikan Ekonomi

JURKAMI

VOLUME
8

NOMOR
1

SINTANG
APRIL
2023

e-ISSN
2541-0938
p-ISSN
2657-1528



DEWAN REDAKSI

Munawar Thoharudin, STKIP Persada Khatulistiwa Sintang, Indonesia (Editor in Chief)
Aditya Aditya Halim Perdana Kusuma, Universitas Muslim Indonesia, Indonesia
Aniek Hindrayani, Universitas Sebelas Maret, Indonesia
Anna Marganingsih, STKIP Persada Khatulistiwa Sintang, Indonesia
Dessy Triana Relita, STKIP Persada Khatulistiwa Sintang, Indonesia
Diyah Santi Hariyani, Universitas PGRI Madiun, Indonesia
Emilia Dewiwati Pelipa, STKIP Persada Khatulistiwa Sintang, Indonesia
Fitria Fitria, Universitas Bina Insan Lubuklinggau, Indonesia
Husni Syahrudin, Universitas Tanjungpura Pontianak, Indonesia
Inda Fresti Puspitasari, Universitas Muhammadiyah Surakarta, Indonesia
Maria Ulfah, Universitas Tanjungpura Pontianak, Indonesia
Nikmatul Masruroh, UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, Indonesia
Nuraini Asriati, Universitas Tanjungpura, Indonesia
Rio Nardo, Universitas Binawan, Indonesia
Suwinto Johan, President University, Indonesia
Yulia Suriyanti, STKIP Persada Khatulistiwa Sintang, Indonesia

TIM REVIEWER

Abdul Mujib, Institut Agama Islam Negeri Metro Lampung, Indonesia
Abdul Samad, Universitas Fajar, Indonesia
Abdul Wahab, Universitas Muslim Indonesia, Indonesia
Bambang Ismanto, Universitas Kristen Satya Wacana, Salatiga, Indonesia
Dadang Lesmana, Badan Riset dan Inovasi Daerah Kab. Kutai Timur, Indonesia
Dewi Kusuma Wardani, Universitas Sebelas Maret, Surakarta, Indonesia
Dicki Hartanto, UIN Sultan Syarif Kasim Riau, Indonesia
Dudung Ma'ruf Nuris, Universitas Negeri Malang, Indonesia
Eko Eddy Supriyanto, STKIP Nahdlatul Ulama Tegal, Indonesia
Febrianty Febrianty, Politeknik PalComTech, Indonesia
Muhammad Syaiful, Universitas Sembilanbelas November Kolaka
Mohammad Hamim Sultoni, Institut Agama Islam Negeri Madura, Indonesia
M Dana Prihadi, Poltekkes YBA Bandung, Indonesia
M. Rudi Irwansyah, Universitas Pendidikan Ganesha, Indonesia
Muh. Fahrurrozi, Universitas Hamzanwadi, Indonesia
Muhammad Hasan, Universitas Negeri Makassar, Indonesia
Muhammad Ihsan Said Ahmad, Universitas Negeri Makassar, Indonesia
Muhammad Rahmattullah, Universitas Lambung Mangkurat, Indonesia
Reni Yuliviona, Universitas Bung Hatta, Indonesia
Rhini Fatmasari, Universitas Terbuka, Indonesia
Sodik Dwi Purnomo, Universitas Wijaya kusuma Purwokerto, Indonesia
Sugiharsono, Universitas Negeri Yogyakarta, Indonesia
Suratno Suratno, Universitas Jambi, Indonesia
Tutut Suryaningsih, Universitas Bhinneka PGRI Tulungagung, Indonesia
Umi Kalsum, Universitas Sriwijaya, Indonesia
Yapiter Marpi, Universitas Jakarta, Indonesia
Zulfia Hanum Alfi Syahr, Badan Riset dan Inovasi Nasional, Indonesia

Alamat Redaksi:

Jln. Pertamina Sengkuang Km.4, Kotak Pos 126, Kecamatan Sintang, Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat, Indonesia

Email: jurnaljurkami@gmail.com

Penerbit: LPPM STKIP Persada Khatulistiwa Sintang





**ANALISIS KAUSALITAS DANA DESA, PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR,
DAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT DI KECAMATAN GONDANGREJO
KABUPATEN KARANGANYAR**

Egidea Amengku Sukma[✉], Inda Fresti Puspitasari²

Program Studi Ekonomi Pembangunan, Universitas Muhammadiyah Surakarta, Indonesia¹²

[✉]Corresponding Author Email: egidhea2001@gmail.com

Author Email: ifp426@ums.ac.id

Abstract:

Article History:
Received: March 2023
Revision: March 2023
Accepted: March 2023
Published: April 2023

Keywords:
Village Funds;
Infrastructure;
Welfare;
Granger Causality

All villages in Gondangrejo District are classified as self-sufficient villages, have a well-known agricultural sector, have high-quality industrial areas, are quite large, and function as economic developers. However, because the carrying capacity of infrastructure is very low due to the absorption capacity used for handling Covid-19, many roads have been damaged and connections between villages have not been tendered. This study aims to observe the pattern of causality between infrastructure, village funds and the level of community welfare in Gondangrejo District, Karanganyar Regency in 2017-2021. This study uses the Granger Causality Test method. In the Granger Causality test, the data requirements used are stationary data. The results of the Granger Causality Test state that there is a one-way causality relationship between the level of welfare affecting village funds and a two-way causality between village funds causing or influencing infrastructure and vice versa. Based on these results, it is hoped that the village government can pay more attention and study more in the management of village funds. Further review needs to be carried out in carrying out the infrastructure development needed by the community, so that the absorbed village funds will produce infrastructure that is directly useful for the economic activities of the villagers.

Abstrak:

Sejarah Artikel
Diterima: Maret 2023
Direvisi: Maret 2023
Disetujui: Maret 2023
Diterbitkan: April 2023

Kata kunci:
Dana Desa;
Infrastruktur;
Tingkat Kesejahteraan;
Kausalitas Granger

Seluruh Desa di Kecamatan Gondangrejo terklasifikasi desa swasembada, memiliki sektor pertanian yang terkenal, memiliki kawasan industri yang berkualitas tinggi, cukup besar, dan berfungsi sebagai pengembang ekonomi. Namun, karena daya dukung infrastruktur sangat rendah akibat daya serap yang digunakan untuk penanganan Covid-19, menyebabkan banyak jalan rusak dan sambungan antar desa yang belum terlelang. Penelitian ini bertujuan untuk mengamati pola kausalitas antara infrastruktur, dana desa dan tingkat kesejahteraan masyarakat di Kecamatan Gondangrejo Kabupaten Karanganyar Tahun 2017-2021. Penelitian ini menggunakan metode Uji Kausalitas Granger. Pada pengujian Granger Causality, syarat data yang digunakan adalah data bersifat stasioner. Hasil Uji Kausalitas Granger menyatakan bahwa terdapat hubungan kausalitas satu arah antara tingkat kesejahteraan mempengaruhi dana desa dan kausalitas dua arah antara dana desa menyebabkan atau mempengaruhi infrastruktur dan begitu pula sebaliknya. Berdasarkan hasil tersebut, pemerintah desa diharapkan dapat memperhatikan dan mengkaji lebih lagi dalam pengelolaan dana desa. Perlu dilakukan tinjauan lebih lagi dalam melaksanakan pembangunan infrastruktur yang diperlukan masyarakat, sehingga dana desa yang terserap akan membuahkan infrastruktur yang langsung berguna bagi kegiatan ekonomi warga desa.





How to Cite: Sukma, E.A., Puspitasari, I.F. 2023. *Analisis Kausalitas Dana Desa, Pembangunan Infrastruktur dan Kesejahteraan Masyarakat di Kecamatan Gondangrejo Kabupaten Karanganyar*. Jurnal Pendidikan Ekonomi (JURKAMI), 8 (1) DOI : 10.31932/jpe.v8i1.2212

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara kepulauan yang luas menjadikan Pemerintah Pusat melimpahkan beberapa wewenang kepada Pemerintah Daerah. Pemerintah pusat memberikan wewenang dalam mengatur urusan intern pemerintahan dan kepentingan masyarakat masing-masing desa, termasuk mengelola penggunaan dana desa. Pemerintah daerah diberi hak membangun desa sesuai dengan hak kolektif desa (Lai & Tang, 2016). Dalam konsep Nawa Cita ketiga Presiden Joko Widodo “Membangun Indonesia dari Pinggiran dengan memperkuat Daerah dan Desa Negara Indonesia”. Oleh karena itu, membuat Pemerintah Pusat mengalokasikan dana khusus yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara langsung pada Pemerintah Desa bernama Dana Desa (DD).

Dana Desa diperuntukkan membiayai dalam penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. Dalam pasal 4 (Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi No 21 Tahun 2015 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2016, 2015), ditegaskan Dana Desa diprioritaskan untuk anggaran pelaksanaan program dan kegiatan berskala lokal desa bidang pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat desa. Menurut (Nurohman, et al, 2019) kesempatan dan kewenangan Pemerintah Desa dalam melakukan pembangunan diharapkan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Oleh karena itu, dana desa salah satu isu krusial dalam undang-undang desa, perhitungan anggaran berdasarkan jumlah desa dengan memperhitungkan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan tingkat kesulitan geografis dalam rangka meningkatkan kesejahteraan dan pemerataan pembangunan desa.

Pembangunan infrastruktur diarahkan sebagai mengembangkan desa agar dapat meningkatkan laju perekonomian antar desa karena pembangunan infrastruktur yang baik, perekonomian daerah akan meningkat dengan fasilitas memadai dan mempermudah akses pendistribusian barang maupun jasa. Sejalan dengan pendapat (Otheliansyah, 2021) bahwa penggunaan Dana Desa diprioritaskan untuk pembangunan infrastruktur dasar dan pembinaan masyarakat desa agar kualitas sumber daya manusia pada kabupaten daerah tertinggal dapat meningkat. Pembangunan merupakan suatu proses perencanaan sosial yang dilakukan oleh para perencana pembangunan untuk membangun perubahan sosial sehingga dapat menciptakan kesejahteraan masyarakat, pandangan ini diperkuat oleh Koentjaraningrat (Ristanti & Handoyo, 2017). Sedangkan menurut Grigg (Soares, et al, 2021) Infrastruktur merujuk pada sistem fisik dalam menyediakan transportasi, pengairan, drainase, bangunan-bangunan gedung dan fasilitas publik lain seperti listrik, telekomunikasi, air bersih dsb, yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia dalam lingkup sosial dan ekonomi.



Dana Desa menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri No 113 Tahun 2014 merupakan Dana desa yang bersumber dari anggaran pendapatan belanja Negara atau APBN yang diperuntukan bagi desa yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten atau kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah, pelaksanaan pembangunan pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. Dana desa dihitung berdasarkan jumlah desa dan dialokasikan dengan memperhatikan: jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan tingkat kesulitan geografis. Dengan adanya Dana Desa, diharapkan membantu terlaksananya program pemerintahan desa dalam pembangunan desa, dan pemberdayaan masyarakat dalam meningkatkan perekonomian masyarakat.

Pembangunan infrastruktur yang baik dan merata akan sangat membantu keberhasilan usaha masyarakat khususnya masyarakat yang tingkat ekonominya rendah dan infrastrukturnya masih sangat terbatas pembangunan suatu wilayah disitulah akan terjadi pemberdayaan masyarakat yang ditimbulkan sesuai kebutuhan masyarakat daerah tersebut sehingga tercipta kesejahteraan masyarakat. Kesejahteraan sosial menurut Undang-Undang Nomor 11 tahun 2009 adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya. Dengan adanya peraturan mengenai pengelolaan dana desa dan prioritas penggunaan dana desa, pemerintah berharap tujuan dari dikurirkannya dana desa untuk pemberdayaan dan kesejahteraan masyarakat sehingga dapat meningkatkan tingkat kehidupan masyarakat.

Kesejahteraan masyarakat di bidang sosial pada dasarnya merupakan keadaan sosial yang memungkinkan bagi setiap warga Negara untuk dapat memenuhi kebutuhan hidup yang bersifat jasmani, rohani dan sosial sesuai dengan hakekat dan martabat manusia untuk dapat mengatasi berbagai masalah sosial yang dihadapi diri, keluarga dan masyarakatnya untuk berkembang menjadi lebih baik (Rahman, 2018). Menurut Prabawa (Sriyono et al, 2021) Keluarga dengan tingkat kesejahteraan yang lebih tinggi berarti memiliki kualitas hidup yang lebih baik, sehingga pada akhirnya keluarga tersebut mampu untuk menciptakan kondisi yang lebih baik untuk bisa meningkatkan kesejahteraan mereka. Kesejahteraan adalah aman, sentosa, dan makmur.

Kecamatan Gondangrejo merupakan salah satu kecamatan yang berada di Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah. Luas wilayah ini adalah 4.891.22 Ha, dan jumlah 81.874 jiwa. Di kecamatan Gondangrejo terdiri dari 13 desa yaitu Kragan, Wonosari, Karangturi, Plesungan, Rejosari, Jeruksawit, Krendowahono, Tuban, Wonorejo, desa Dayu, Jatikuwung, Bulurejo, selokaton. Seluruh desa di Kecamatan Gondangrejo sudah berklasifikasi desa swasembada, terkenal sektor pertanian dan termasuk daerah industri besar yang berkualitas dan dijadikan pengembang ekonomi di daerah tersebut. Selain itu Kecamatan Gondangrejo juga sebagai pengembang konservasi peninggalan bersejarah dan masih ada desa wisata lainnya. Namun masih banyak beberapa jalan yang rusak dan penghubung antar desa gagal lelang karena selama dua tahun pandemi Covid-19, banyak anggaran yang terserap untuk penanganan tersebut sehingga anggaran untuk infrastruktur sangat minim. Hal ini



menarik untuk diteliti dalam penggunaan dana desa, pembangunan infrastruktur dan tingkat kesejahteraan masyarakatnya karena sebagian tempat yang dikunjungi wisatawan dan juga sebagai arus pendistribusian barang dan jasa.

Pembangunan fisik atau infrastruktur yang mencukupi ketersediaan fasilitas pelayanan publik seperti sarana pendidikan, sarana kesehatan, rumah ibadah, listrik, jalan, jembatan, transportasi, air bersih, drainase, teknologi dan komunikasi diperlukan untuk masyarakat agar mampu bergerak lebih dinamis dan mempermudah kegiatan ekonomi, dan untuk para investor ingin menanamkan modalnya di daerah, jika tidak demikian dana yang dikeluarkan untuk penanaman modal menjadi lebih besar dan berpengaruh pada harga produk dan pasti membuat lebih mahal dibandingkan dengan yang lain, sehingga produk yang dihasilkan tidak kompetitif.

Menurut (Alpianus et al, 2019), dalam penelitiannya yang bertujuan mengetahui upaya perencanaan pembangunan desa dalam bidang infrastruktur untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Penelitian tersebut menggunakan jenis pendekatan kualitatif. Hal ini hasil dari pada penelitian berhasil dan terlaksana karena efisien dan rasionalitas, peran kelembagaan dan profesionalitas sudah berjalan dengan baik apa yang menjadi tugas dan tanggungjawab pemerintah desa, sehingga program pembangunan infrastruktur di Tahun 2017 berjalan dengan baik.

Menurut (Teki et al, 2020), yang melakukan penelitian tentang efektivitas pemanfaatan dana desa terhadap tingkat kesejahteraan masyarakat di Kecamatan Gemeh Kabupaten Kepulauan Talaud. Analisis yang digunakan adalah analisis statistic deskriptif. Berdasarkan hasil

penelitian ini menunjukkan bahwa Dana Desa yang ada di Kecamatan Gemeh kabupaten kepulauan Talaud secara efektif dengan nilai diatas 100 persen yang menyatakan bahwa Dana Desa memiliki tingkat efektivitas serta memiliki dampak yang positif secara langsung kepada masyarakat di kecamatan Gemeh Kabupaten Kepulauan Talaud.

Menurut (Novan et al, 2018), dalam penelitiannya, yang bertujuan mengetahui Impemementasi pembangunan infrastruktur dalam penyelenggaraannya menerima Dana dari Anggaran dan Belanja Daerah yang disebut dengan alokasi Dana Desa dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang disebut Dana Desa. Berdasarkan hasil penelitian tersebut diperoleh bahwa Pemerintah Desa Ongkaw Dua telah melakukan proses pelaksanaan pembangunan infrastruktur dalam rangka pelaksanaan pembangunan yang ada di Desa Ongkaw Dua.

Menurut (Muslihah et al., 2019), Dalam penelitiannya, yang bertujuan mengetahui dampak Dana Desa terhadap pembangunan dan kesejahteraan wilayah Kabupaten Bantul Daerah Istimewa Yogyakarta. Penelitian tersebut dilakukan dengan membandingkan indicator pembangunan dan kesejahteraan antara sebelum dan sesudah adanya Dana Desa. Sampel yang digunakan dalam penelitian menggunakan 75 desa yang ada di Kabupaten Bantul. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa terdapat perbedaan yang signifikan pada pembangunan infrastruktur dan kesejahteraan masyarakat. Pemberiaan Dana Desa memberikan dampak positif terhadap pembangunan fisik dan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Bantul Daerah Istimewa Yogyakarta.

Menurut (Wibowo et al., 2019), dalam penelitiannya, yang bertujuan

mengetahui dampak Alokasi Dana Desa terhadap peningkatan pembangunan daerah yang dapat dilihat dari pembangunan fisik. Hasil dari penelitian tersebut menyatakan bahwa pengalokasian Dana Desa memberikan dampak perbaikan infrastruktur, namun belum dapat memperbaiki indikator kesejahteraan. Dana Desa mampu meningkatkan pertumbuhan ekonomi Analisis Pengaruh Dana Desa Terhadap Pembangunan Infrastruktur di Kecamatan Nglekok Kabupaten Blitar Supriadi Soelistyo Syaifullah 4 dalam jangka pendek tetapi belum berpengaruh dalam menurunkan jumlah kemiskinan dan pengangguran.

Adapun relevansi penelitian ini dengan penelitian yang terdahulu adalah adanya penelitian mengenai Dana Desa, Pembangunan Infrastruktur. Dan Kesejahteraan Masyarakat. Pengembangan penelitian ini dengan penelitian terdahulu yaitu terletak pada variabel penelitian, metode penelitian, objek penelitian yang menggunakan desa-desa di Kecamatan Gondangrejo Kabupaten Karanganyar, serta tahun penelitian.

Tujuan dari penelitian ini untuk mengamati pola kausalitas antara infrastruktur, dana desa dan tingkat kesejahteraan masyarakat di Kecamatan Gondangrejo Kabupaten Karanganyar Tahun 2017-2021.

METODE PENELITIAN

Untuk menganalisis bagaimana hubungan timbal balik antara dana desa, pembangunan infrastruktur dan tingkat kesejahteraan masyarakat di 13 Desa di Kecamatan Gondangrejo selama tahun 2017-2021, maka alat analisis yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah Uji Kausalitas Granger.

Model penelitian yang digunakan merujuk pada penelitian Nurohman & Qurniawati (2019) dengan persamaan sebagai berikut:

$$INF_{it} = \sum_{i=1}^m \alpha_{it} INF_{t-i} + \sum_{j=1}^m \beta_j TKS_{t-j} + e_{it}$$

$$TKS_{it} = \sum_{i=1}^m \lambda_{it} TKS_{t-i} + \sum_{j=1}^m \delta_j INF_{t-j} + e_{it}$$

$$DD_{it} = \sum_{i=1}^m \alpha_{it} DD_{t-i} + \sum_{j=1}^m \beta_j TKS_{t-j} + e_{it}$$

$$TKS_{it} = \sum_{i=1}^m \lambda_{it} TKS_{t-i} + \sum_{j=1}^m \delta_j DD_{t-j} + e_{it}$$

$$DD_{it} = \sum_{i=1}^m \alpha_{it} DD_{t-i} + \sum_{j=1}^m \beta_j INF_{t-j} + e_{it}$$

$$INF_{it} = \sum_{i=1}^m \lambda_{it} INF_{t-i} + \sum_{j=1}^m \delta_j DD_{t-j} + e_{it}$$

di mana *INF* adalah infrastruktur yang dinyatakan dalam satuan Rupiah, *DD* yaitu dana desa dengan satuan Rupiah, dan *TKS* merupakan tingkat kesejahteraan yang diukur dengan menggunakan banyaknya keluarga menurut tingkat kesejahteraan.

Tahap estimasi model ekonometrik di atas akan melalui uji stasioneritas pada variabel *INF*, *DD* dan *TKS*. Apabila ketiga variabel stasioner maka langsung dilakukan uji kausalitas Granger. Sementara itu, apabila salah satu variabel tidak stasioner, maka akan distasionerkan sebelum dilakukan uji kausalitas Granger.

Jenis Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data panel yang merupakan gabungan dari data *time series* dari periode 2017-2021 dan data *cross section* di 13 Desa di Kecamatan Gondangrejo. Sumber data diperoleh dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) dan Badan Pusat Statistik.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan (UU Nomor 6, 2014) Dana Desa wajib digunakan untuk empat hal utama yaitu penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pembinaan, dan pemberdayaan masyarakat. Fokus pada pemberdayaan warga, Dana Desa diperuntukan guna meningkatkan kesejahteraan warga. Meningkatnya alokasi Dana Desa sepatutnya diiringi



dengan terus menjadi membaiknya keadaan sosial ekonomi warga di wilayah tersebut. Data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan total dana pembangunan infrastruktur dan dana desa di tiap desa di setiap tahunnya. Sementara itu, tingkat kesejahteraan diperoleh dari rata-rata pendapatan perkapita masyarakat di tiap desa. Pada pengujian Granger Causality, syarat data yang digunakan adalah data bersifat stasioner yang nilai rata-rata dan variannya tidak mengalami perubahan secara sistematis sepanjang waktu, atau rata-rata dan variannya konstan.

Tabel 1. Uji Stasioneritas Tingkat Level

<i>Variabel</i>	<i>Stat</i>	<i>Prob</i>
INF	24,559	0,544
DD	4,469	1,000
TKS	18,362	0,862

Sumber: Eviews, 2022 (diolah)

Dari Tabel 1 terlihat hasil uji stasioner masing-masing variabel nilai probabilitas ADF-Fisher $\chi^2 > \alpha$; sehingga masing-masing variabel belum stasioner

Tabel 3. Hasil Uji Kausalitas Granger

<i>Null Hypothesis</i>	<i>F-Stat</i>	<i>Prob.</i>
<i>INF does not Granger Cause TKS</i>	0,109	0,742
<i>TKS does not Granger Cause INF</i>	0,624	0,433
<i>DD does not Granger Cause TKS</i>	0,513	0,476
<i>TKS does not Granger Cause DD</i>	359,838	0,063
<i>DD does not Granger Cause INF</i>	107,522	0,001
<i>INF does not Granger Cause DD</i>	505,179	0,029

Sumber: Eviews, 2022 (diolah)

Berdasarkan hasil uji kausalitas Granger pada tabel 3, diketahui bahwa tingkat kesejahteraan masyarakat berpengaruh atau menyebabkan kenaikan dana desa, terlihat dari probabilitas Uji Kausalitas Granger sebesar $0,063 < (0,10)$; sehingga terdapat hubungan kausalitas satu

dan perlu dilakukan uji stasioneritas pada tingkat *first difference*.

Tabel 2. Uji Stasioneritas Tingkat *First Difference*

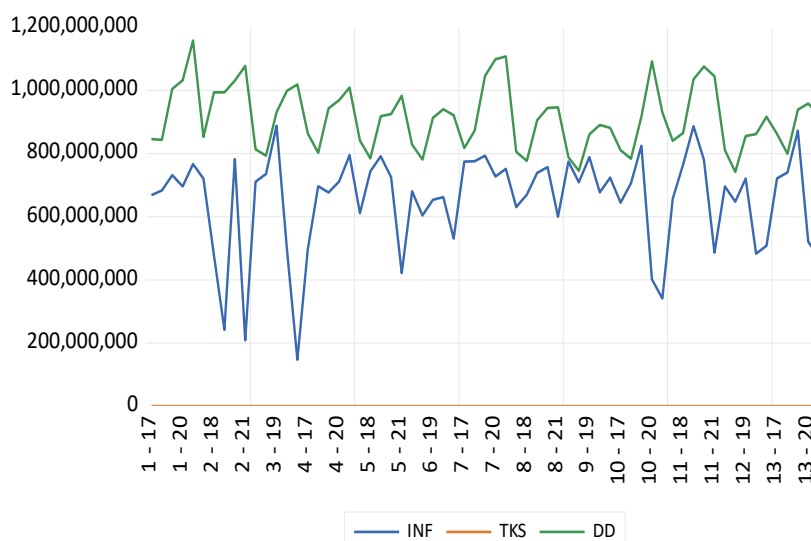
<i>Variabel</i>	<i>Stat</i>	<i>Prob.</i>
INF	68,044	0,000
DD	59,394	0,000
TKS	56,672	0,002

Sumber: Eviews, 2022 (diolah)

Dari Tabel 2 terlihat nilai probabilitas ADF-Fisher pada masing-masing variabel stasioner pada tingkat *first difference* dengan nilai probabilitas ADF-Fisher χ^2 masing-masing sebesar 0,000 ($< 0,01$); 0,000 ($< 0,01$) dan 0,002 ($< 0,01$). Dengan demikian, ketiga data stasioner dan dapat dilanjutkan pengujian kausalitas Granger. Metode kausalitas Grange digunakan untuk melihat hubungan kausalitas (timbal balik) antara tingkat kesejahteraan dan dana desa. Hasil uji kausalitas Granger pada pasangan variabel infrastruktur, dana desa, dan tingkat kesejahteraan tersaji pada Tabel 3 dan Grafik 1

arah antara tingkat kesejahteraan dan dana desa. Sementara itu, Tabel 3 juga memperlihatkan bahwa terdapat kausalitas dua arah antara dana desa dan infrastruktur, terlihat dari probabilitas Uji Kausalitas Granger masing-masing sebesar $0,001 < (0,01)$ dan $0,029 < (0,05)$. Dengan

demikian, dana desa menyebabkan atau mempengaruhi infrastruktur dan begitu pula sebaliknya.



Grafik 1
Hasil Uji Kausalitas Granger
Sumber: Eviews, 2022 (diolah)

Hasil uji kausalitas Granger menunjukkan bahwa infrastruktur dan tingkat kesejahteraan tidak memiliki hubungan kausalitas. Dengan demikian, kedua variabel ini tidak saling mempengaruhi satu sama lain. Hal ini terjadi karena pembangunan atau peningkatan infrastruktur di pedesaan biasanya ditujukan kepada fasilitas publik seperti jalan desa ataupun saluran pembuangan air atau irigasi persawahan, sehingga tingkat kesejahteraan masyarakat tidak akan langsung terdampak dari pembangunan infrastruktur yang terjadi. Selain itu, banyak warga yang juga bekerja di luar lingkup desa, sehingga infrastruktur yang tersedia di dalam desa tidak berpengaruh terhadap tingkat kesejahteraan penduduk.

Hasil dalam penelitian ini sejalan dengan Malo & Firdausi (2019) yang menemukan bahwa perencanaan pembangunan desa di bidang infrastuktur tidak berpengaruh terhadap tingkat

kesejahteraan masyarakat karena masih minimnya dana alokasi pembangunan infrastruktur. Demikian halnya dengan hasil (Wibowo, et al, 2019) menunjukkan bahwa pengalokasian Dana Desa memberikan dampak perbaikan capaian output pelayanan infrastruktur, pendidikan dan kesehatan, serta memperbaiki capaian perekonomian, namun belum dapat memperbaiki indikator kesejahteraan. Dana Desa diperkirakan mampu meningkatkan pertumbuhan ekonomi dalam jangka pendek, namun belum berpengaruh dalam penurunan kemiskinan dan pengangguran.

Hasil uji kausalitas Granger menyatakan bahwa dana desa tidak menyebabkan atau mempengaruhi tingkat kesejahteraan. Akan tetapi, tingkat kesejahteraan menyebabkan dan berpengaruh terhadap dana desa. Hal ini menjadi wajar karena jika tingkat kesejahteraan warga naik, maka iuran sukarela yang dilakukan untuk

membangun desa dari warga desa juga akan meningkat. Terlebih lagi kecenderungan penduduk di pedesaan yang gotong royong dalam membangun desa akan sangat mempengaruhi dana desa yang terkumpul dari masyarakat di dalam desa tersebut. Hasil ini mendukung temuan Pangalo et al. (2020) yang menyatakan bahwa tingkat kesejahteraan berpengaruh terhadap dana desa.

Uji kausalitas Granger dalam penelitian ini menyatakan bahwa terdapat hubungan kausalitas antara dana desa menyebabkan atau mempengaruhi infrastruktur dan begitu pula sebaliknya. Dengan demikian, kedua variabel ini saling mempengaruhi dan sangat penting bagi pembangunan desa. Naiknya dana desa tentunya akan menyediakan dana pembangunan lebih untuk meningkatkan infrastruktur desa yang sangat diperlukan masyarakat dalam beraktivitas. Selain itu, jika infrastruktur ditingkatkan, maka perekonomian masyarakat akan berjalan lebih efisien dan berdampak pada pendapatan mereka, sehingga dana desa juga akan naik. Menurut Mahfudz (Nurohman, et al, 2019) Alokasi Dana Desa berperan penting dalam pembangunan fisik desa. Penggunaan dana desa menjadi tanggung jawab penuh pemerintahan desa. Temuan ini sejalan dengan Mamonto et al. (2018) yang menemukan bahwa implementasi pembangunan infrastruktur desa berpengaruh terhadap ketersediaan dana desa.

PENUTUP

Berdasarkan pembahasan analisis hasil regresi yang dilakukan, dapat diambil beberapa kesimpulan antara lain variabel infrastruktur, dana desa dan tingkat kesejahteraan stasioner. Uji kausalitas Granger menyatakan bahwa terdapat

hubungan kausalitas satu arah antara tingkat kesejahteraan mempengaruhi dana desa dan kausalitas dua arah dana desa menyebabkan atau mempengaruhi infrastruktur dan begitu pula sebaliknya. Berdasarkan hasil tersebut, pemerintah desa diharapkan dapat memperhatikan dan mengkaji lebih lagi dalam pengelolaan dana desa. Perlu dilakukan tinjauan lebih lagi dalam melaksanakan pembangunan infrastruktur yang diperlukan masyarakat, sehingga dana desa yang terserap akan membuahkan infrastruktur yang langsung berguna bagi kegiatan ekonomi warga desa. Harapannya kegiatan penduduk dapat berjalan lebih efisien, sehingga mereka akan lebih produktif dan perekonomian meningkat.

DAFTAR PUSTAKA

- Akbar, M. T., & Sihaloho, E. D. (2019). The Impact of Village Fund Program in Developing Physical Infrastructure: Case on Construction Value Across Provinces in Indonesia. *Media Trend*, 14(2), 194–200.
- Amin, S. (2020). Do The Village Fund Management Influence On The Economic Development Of The Village? In *Journal of Applied Business and Economics (JABE)* (Vol. 7, Issue 1).
- Amin, S., Widaninggar, N., & Mandala Jember Article Info, S. (2019). Economics Development Analysis Journal Influence of Village Funds on Capital Accumulation and Community Empowerment. *Economics Development Analysis Journal*, 8(2).
- Astari, C. 2014. Analisis Kausalitas Granger Antara PDRB, Investasi Dan Belanja Modal Di Provinsi Jawa



- Tengah. *Economics Development Analysis Journal* 3 (2) (2014).
<http://journal.unnes.ac.id/sju/index.php/edaj>
- Cakrawijaya, M. A. (2014). Evaluasi Program Pembangunan Infrastruktur Pedesaan di Desa Wonokerto. *Kecamatan Turi, Kabupaten Sleman*.
- Lai, Y., & Tang, B. (2016). Institutional barriers to redevelopment of urban villages in China: A transaction cost perspective. *Land Use Policy*, 58, 482–490.
- Malo, A., & Firdausi, F. (2019). Upaya Perencanaan Pembangunan Desa Dalam Bidang Infrastruktur Untuk Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat. *Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik (JISIP)*, 8(3), 53–58.
- Mamonto, N., Sumampow, I., & Undap, G. (2018). Implementasi Pembangunan Infrastruktur Desa Dalam Penggunaan Dana Desa Tahun 2017 (Studi) Desa Ongkaw Ii Kecamatan Sinonsayang Kabupaten Minahasa Selatan. *Jurnal Eksekutif*, 1(1).
- Mangu, B. (2017) Alokasi Dana Desa dan Dana Desa Dalam Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Masyarakat Desa. *JURKAMI : Jurnal Pendidikan Ekonomi VOLUME 2, NO 1, 2017*.
- Mujiwardhani, A., Wibowo, H., & Mulya, I. T. (2019). Dampak alokasi dana desa bagi pembangunan daerah dan kesejahteraan masyarakat. *Jurnal Anggaran Dan Keuangan Negara Indonesia (AKURASI)*, 1(2), 164.
- Muslihah, S., & Siregar, H. O. (2019). Dampak alokasi dana desa terhadap pembangunan dan kesejahteraan masyarakat desa di Kabupaten Bantul Daerah Istimewa Yogyakarta.
- Jurnal Akuntansi, Ekonomi Dan Manajemen Bisnis*, 7(1), 85–93.
- Nurohman, Y.A., Qurniawati, R.S., Fuad Hasyim, F. 2019. Dana Desa Dalam Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Pada Desa Wisata Menggoro. *Jurnal Magisma Vol. 7 No. 1 –Tahun 2019*
- Otheliansyah, G. & Yasni, R. (2021). Pengaruh penyaluran dana desa pada indikator perekonomian kabupaten daerah tertinggal di Indonesia. *Indonesian Treasury Review: Jurnal Perbendaharaan, Keuangan Negara dan Kebijakan Publik*, 6(1), 57-74.
- Pangalo, T., Rotinsulu, D. C., & Tumangkeng, S. Y. L. (2020). Efektivitas Pemanfaatan Dana Desa Terhadap Tingkat Kesejahteraan Masyarakat di Kecamatan Gemeh Kabupaten Kepulauan Talaud. *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi*, 20(03).
- Ristanti, Y. D., & Handoyo, E. (2017). Undang-undang otonomi daerah dan pembangunan ekonomi daerah. *Jurnal RAK (Riset Akuntansi Keuangan)*, 2(1), 115–122.
- Rahman, A. 2018. Identifikasi Strategi Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Di Kecamatan Sungaiambawang Kabupaten Kuburaya Provinsi Kalimantan Barat. *Jurnal Manajemen Pembangunan Vol. 5, No. 1/ Juni 2018: 17 – 36*
- Soares, G.L., Hidayati, A.N., Gai, A.M. 2020. Analisa Kebutuhan Infrastruktur Di Kawasan Perbatasan Indonesia Dan Timor Leste (Desa Asumanu, Tohe Dan Maumutin) *Jurnal Plano Buana, Vol 1 No 1, Oktober 2020*



253 | **Egidea Amengku Sukma, Inda Fresti Puspitasari.** *Analisis Kausalitas Dana Desa, Pembangunan Infrastruktur dan Kesejahteraan Masyarakat di Kecamatan Gondangrejo Kabupaten Karanganyar*

Soebagyo, D., Tri Cahyono, Y., & Saing
Daerah dan Implikasinya terhadap
Pembangunan Abstrak, D. (2013).
Regional Competitiveness and Its
Implications for Development. In
Jurnal Ekonomi Pembangunan (Vol.
14, Issue 2).

Sriyono., Dewi, S.R., Handayani, P. 2021.
Meningkatkan Kesejahteraan
Masyarakat Nelayan Di Era New
Realiti Melalui Model Pembiayaan
Inklusif: Prespektif AI Mudharobah.
Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam, 7(01),
2021, 81-89. [http://jurnal.stie-
aas.ac.id/index.php/jie](http://jurnal.stie-aas.ac.id/index.php/jie)

Undang-Undang Republik Indonesia.
(2014). Undang-Undang Nomor 6
Tahun 2014 tentang Desa.

Wibowo, H., Mulya, I.T., Mujiwardhani,
A. 2019. Dampak Alokasi Dana
Desa Bagi Pembangunan Daerah
Dan Kesejahteraan Masyarakat.
*Jurnal Anggaran dan Keuangan
Negara Indonesia (AKURASI)* Vol.
1 No. 2 (2019) [https://anggaran.e-
journal.id/akurasi](https://anggaran.e-journal.id/akurasi)

Yusuf Maolani, D. (2019). *Strengthening
Village and Village Government
Towards Sustainable Development
In The Framework Of Increasing
Community Welfare.* In *JISPO* (Vol.
9, Issue 2).

